



PEMERINTAH KABUPATEN
NATUNA



RENCANA KERJA **(RENJA)** SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2027



MELAYANI
MENGKOORDINASIKAN
MENGAKSELERASI

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA





BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);
 11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Natuna.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045.
- (3) RKPD Tahun 2027 disusun dengan maksud:
 - a. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan; dan

- b. pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
- (4) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah.

BAB II PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2027 dengan melalui proses sebagai berikut:
 - a. pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, kecamatan, forum Perangkat Daerah/gabungan Perangkat Daerah dan sampai pada tingkat musyawarah rencana pembangunan kabupaten yang menghasilkan rancangan RKPD Tahun 2027; dan
 - b. rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Naskah RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Juli 2026



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 Juli 2026



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 456



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2027. Dokumen ini disusun sebagai landasan perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perlu kami sampaikan bahwa penyusunan RENJA Tahun 2027 ini berada dalam masa awal pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029. Oleh karena itu, arah dan prioritas yang tertuang dalam dokumen ini mengacu pada sasaran akhir dari Renstra 2025-2029, sekaligus memperhatikan dinamika kebijakan serta kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Penyusunan RENJA ini juga dilaksanakan dalam konteks adanya kebijakan efisiensi anggaran yang terus diintensifkan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam merancang program dan kegiatan yang tetap adaptif, efektif, dan efisien. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal pada tahun 2027.

Akhir kata, kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan Rencana Kerja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, serta mencapai visi dan misi Kabupaten Natuna yang unggul dan sejahtera.

Ranai, 13 Agustus 2026



SEKRETARIS DAERAH

BOY WIJANAFKO VARIANTO, S.E

Pemrina Utama Madya/IV.d

NIP. 19770809 200212 1005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	34
2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Telaahan Terhadap RPJMD Kabupaten Natuna Peridoe 2025- 2029	39
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
4.1 Rencana Kerja Program	47
4.2 Cascading dan Crosscuting	49
BAB IV PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Renstra Tahun 2025..... .8

Tabel 2.2

Capaian Indikator Program Tahun 2025..... .9

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025..... 11

Tabel 2.4

Evaluasi Terhadap Hasil Renja-Skpd Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025 12

Tabel 2.5

Evaluasi Terhadap Capaian Anggaran Tahun 2025 32

Tabel 2.6

Usulan Partisipatif Dari Masyarakat Tahun 2027 36

Tabel 3.1

Keselarasan Sasaran Renstra Kemendagri, Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau dan Sekretariat Daerah Kab. Natuna..... 38

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra..... 43

Tabel 3.3

Kebijakan, Program Aktifitas dan Kegiatan Aktifitas 44

Tabel 3.4

Indikator Sasaran Program Sekretariat Daerah 45

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 46

Tabel 4.1

Program Prioritas Kepala Daerah 49

Tabel 4.2

Crosscutting Issu Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna..... 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1

Tujuan Renstra Sekretariat Daerah 40

Gambar 3.2

Tujuan, Sasaran dan Target Indikator 42

Gambar 4.1

Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 51

Gambar 4.2

Pernjenjangan Kinerja Sekretariat Daerah..... .52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dikenal sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 16, Pasal 126, dan Pasal 131 yang mengatur secara sistematis tahapan penyusunan dokumen Renja. Adapun tahapan tersebut meliputi: (1) persiapan penyusunan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) perumusan rancangan akhir, dan (6) penetapan. Tujuan utama dari penyusunan Renja adalah untuk menjamin konsistensi dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan dalam kerangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2027 disusun sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Renja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Dengan

demikian, penyusunan Renja Tahun 2027 berada dalam masa awal pelaksanaan Renstra periode 2025–2029, namun tetap mengacu pada arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra periode berjalan. Selain itu, penyusunan Renja ini juga mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran yang masih menjadi arahan dari Pemerintah Pusat.

Tema RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2027 adalah “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya” yang juga akan menjadi landasan utama dalam penetapan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renja ini merujuk pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029, yaitu: (1) belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi dan aspek kebijakan, pengawasan, serta proses evaluasinya; (2) masih rendahnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi; dan (3) kurangnya koordinasi dan pemahaman OPD dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan sistematika sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
 - 5) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, odefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Natuna Nomor 31);

- 17) Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2027 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen operasional yang menjabarkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 ke dalam rencana tahunan yang bersifat terukur dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2027.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan target dan sasaran pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah ke dalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional dan realistis.
2. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027.
3. Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta koordinasi lintas sektor di tahun anggaran berjalan.
4. Meningkatkan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi program dan kegiatan agar lebih terintegrasi dan akuntabel.

5. Menyediakan dasar bagi proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk menelaah tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah, dengan mengacu pada hasil rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta realisasi capaian Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun bersangkutan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Penilaian mencakup realisasi capaian output kegiatan, capaian kinerja program, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029.

Dengan dilaksanakannya evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Hasil evaluasi ini juga menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Renstra Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabilitas	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP dengan Predikat >70	Persen	60,00	59,57	99,29
		Persentase UPP yang memperoleh kategori minimal Baik (B)	Persen	39,00	47,6	110,00
		Indek Kualitas Kebijakan	Nilai	68,7	58,33	84,91
		Indek Reformasi Hukum	Nilai	87,2	87,82	100,71
2	Memperkuat Koordinasi pengendalian dan kebijakan prekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif dan berbasis data	Nilai Tata Kelola Pengadaan	Nilai	85	87,1	95,81
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	4,27	4,20	98,36

Data pada gambar menunjukkan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang diukur melalui dua sasaran utama beserta indikatornya. Pada sasaran pertama, yaitu *meningkatnya kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel*, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP di atas 70

hampir mencapai target (99,29%), sementara persentase UP yang memperoleh kategori minimal Baik bahkan melampaui target hingga 110%. Indikator Indeks Reformasi Hukum juga menunjukkan kinerja optimal dengan capaian 100,71%. Namun demikian, terdapat indikator yang masih perlu perhatian, yaitu Indeks Kualitas Kebijakan yang hanya mencapai 84,91%, menunjukkan bahwa kualitas perumusan kebijakan masih belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Pada sasaran kedua, yaitu *memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data*, capaian kinerja secara umum tergolong baik namun belum melampaui target. Nilai Tata Kelola Pengadaan mencapai 95,81% dari target, sedangkan Indeks Akses Keuangan Daerah berada pada capaian 98,36%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem koordinasi dan pengendalian sudah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam optimalisasi tata kelola pengadaan dan akses keuangan daerah. Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah dapat dikategorikan baik dengan beberapa indikator unggul, namun tetap memerlukan perbaikan pada aspek kualitas kebijakan dan penguatan tata kelola agar lebih konsisten melampaui target.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Program Tahun 2025

N o	Program	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Capaian Target	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76.62	89	116%
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4.47	4.04	90%
		Persentase agenda pimpinan daerah yang dipublikasikan secara terbuka melalui	persen	100	100	100%

N o	Program	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Capaian Taget	%
1	2	3	4	5	6	7
		media resmi pemerintah				
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69.00	68.20	99%
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persen	70	100	143%
		Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Nilai	25.92	26.41	102%
		Persentase keterlaksanaan kegiatan strategis daerah	Persen	100	60	60%
3	Program Pemerintahan dan Kersejahteraan	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan, pembinaan mental dan sosial kemasyarakatan	persen	85	82	96%
		Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah	Persen	50	92.72	185%
		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Nilai	2.95	2.904	98%
		Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	83.00	80	96%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program, secara umum kinerja Sekretariat Daerah menunjukkan hasil yang cukup baik, di mana sebagian besar indikator telah mencapai atau bahkan melampaui target tahunan, seperti Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah (143%), Persentase produk hukum daerah yang terdigitalisasi dan dapat diakses publik (185%), Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (116%), serta Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan (102%).

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, terutama Persentase keterlaksanaan kegiatan

strategis daerah (60%), Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (90%), serta beberapa indikator lain yang masih berada pada kisaran 96–99%, sehingga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan program, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan koordinasi agar seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

No	KEGIATAN	Indikator	Satuna	Target	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang terlaksana sesuai rencana tahunan	Kegiatan	11	9	81.82%
2.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tingkat kepuasan pengguna layanan hukum (OPD) terhadap layanan	Nilai IKM	75.00	0	0.00%
3.	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Kecamatan/kelurahan yang memiliki kinerja baik	persen	23.5	29	123.40%
4.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti dengan perjanjian resmi (MoU/PKS)	Persen	80	133.33	166.66%
5	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah forum koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	kegiatan	4	7	175.00%
6	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi forum sumber daya alam yang difasilitasi setiap tahun	kegiatan	4	3	75.00%
7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase nilai pengadaan melalui e-purchasing terhadap total nilai pengadaan	Persen	50	22.3	44.60%
8	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tingkat kepatuhan perangkat daerah melaporkan hasil pengendalian pembangunan daerah	Persen	80	100	125.00%
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah	persen	90	82	91.11%
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase keterlaksanaan kegiatan keprotokolan sesuai standar	Persen	100	100	100.00%
11	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Dievaluasi Kelembagaannya	persen	80	100	125.00%
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan audit yang ditindaklanjuti tepat waktu.	Persen	100	100	100.00%
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diproses secara tepat dan akurat	persen	75	80	106.67%
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantora	Persen	75	65	86.67%
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rasio Pengadaan BMD terhadap Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang ada dalam DPA	Persen	50	26.28	52.56%
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	persen	100	100	100.00%
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Sekretariat Daerah yang dipelihara	persen	75	15	20.00%
18	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pencairan anggaran operasional kepala daerah dan wakil kepala daera	Persen	85	89.61	105.42%
19	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Pemenuhan Logistik dan Operasional Rumah Dinas KDH/WKDH	persen	80	25	31.25%

Tabel 2.4

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
							1	2	3	4	5	6		7		8		9		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01	SEKRETARIAT DAERAH			51.590.529.099		6.647.058.211		25.078.569.359		9.460.973.245		7.593.606.860		48.780.207.675	87,63	94,55		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			78.060.946		2.756.245		14.090.333		22.079.330		5.397.541		44.323.449	50	56,78	Bagian Administrasi Pembangunan	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	NILAI LAPORAN LKJIP (Nilai)	78,65		0		0		68,9		68,9		68,9		87,6			
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0		0		0		69		69		0					
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.060.946		2.756.245		14.090.333		22.079.330		5.397.541		44.323.449	50	56,78		
			Meningkatnya realisasi anggaran dan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		1		2		3		100			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0					
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			78.060.946		2.756.245		14.090.333		22.079.330		5.397.541		44.323.449	100	56,78		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		0		1		2		3		100			
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			285.460.510		5.265.520		40.905.630		150.010.350		12.405.617		208.587.117	100	73,07	Bagian Administrasi Pembangunan	
			Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan strategis daerah secara berkala dan teratur.	Tingkat keterlaksanaan kegiatan strategis prioritas daerah (%)	0												0			
				PERSENTASE REALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Persen)	90		13		37		63		87		87		96,67			
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			285.460.510		5.265.520		40.905.630		150.010.350		12.405.617		208.587.117	100	73,07		
			Terlaksananya Pengendalian pembangunan daerah berbasis informasi yang akurat dan mudah diakses.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			171.441.770		4.229.270		28.751.600		89.619.750		8.060.953		130.661.573	100	76,21		
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			114.018.740		1.036.250		12.154.030		60.390.600		4.344.664		77.925.544	100	68,34		
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			375.394.161		5.308.800		187.473.003		98.099.382		40.865.351		331.746.536	66,67	88,37	Bagian Tata Pemerintahan	

			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Skor)	0							291		291		0			
				PENINGKATAN NILAI LPPD (Nilai)	3,34		29		29		29		29		29		86,83		
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				375.394.161		5.308.800		187.473.003		98.099.382		40.865.351		331.746.536	66,67	88,37

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
			Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)		1	0		0		0		0		0								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)		1	1		1		1		1		100								
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan		114.651.993		-		48.073.743		8.287.500		28.187.351		84.548.594	100	73,74				
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100				
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		126.748.000		-		67.348.000		59.400.000		-		126.748.000	0	100				
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1		0		0		0		0		0						
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		133.994.168		5.308.800		72.051.260		30.411.882		12.678.000		120.449.942	100	89,89				
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1		1		1		1		1		1		100				
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4.753.747.792		565.390.655		1.794.707.656		992.340.292		418.937.635		3.771.376.238	100	79,33	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
			Meningkatnya Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan, pembinaan mental dan sosial kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan, pembinaan mental dan sosial kemasyarakatan (%)	0		0		100		0		0		100		0				
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.753.747.792		565.390.655		1.794.707.656		992.340.292		418.937.635		3.771.376.238	100	79,33			
			Tersedianya dukungan fasilitasi kegiatan keagamaan dan Kesejahteraan Sosial/Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1		0		4		0		1		1		100				
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		0		0		1		1		100						
			4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		3.193.325.004		179.261.346		1.394.193.956		674.194.398		161.817.491		2.409.467.191	100	75,45			
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1		0		4		0		1		1		100			
			4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			1.560.422.788		386.129.309		400.513.700		318.145.894		257.120.144		1.361.909.047	100	87,28		
				Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			346.104.512		8.954.000		78.998.720		96.517.792		87.507.933		271.978.445	16,32	78,58	Bagian Hukum		
			Meningkatnya Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah	Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah (%)	0											0					

				INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (Nilai)	86		68,2		68,2		68,2		58,33		262,93		305,73			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			346.104.512		8.954.000		78.998.720		96.517.792		87.507.933		271.978.445	16,32	78,58		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tersedianya dukungan fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah yang taat asas dan prosedur	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	500		155		118		95		106		106		21,2			
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	3		0		0		0		0		0		0				
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	400		121		110		100		111		111		111		27,75		
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			154.019.000		8.954.000		19.103.600		41.660.792		44.992.000		114.710.392	21,2	74,48		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	500		155		118		95		106		106		21,2			
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			183.629.912		-		59.895.120		54.057.000		39.706.933		153.659.053	0	83,68		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	3		0		0		0		0		0		0			
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			8.455.600		-		-		800.000		2.809.000		3.609.000	27,75	42,68		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	400		121		110		100		111		111		27,75			
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			94.830.994		3.787.000		40.378.470		15.052.139		28.138.591		87.356.200	120,83	92,12	Bagian Kerja Sama	
			Meningkatnya Kerjasama guna mendorong peningkatan daya saing daerah	Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	0											0				
				PERSENTASE KERJASAMA YANG DITINDAKLANJUTI (Persen)	90	75		87,5		40		0		0		0	0			
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			94.830.994		3.787.000		40.378.470		15.052.139		28.138.591		87.356.200	120,83	92,12		
			Terselenggaranya fasilitasi kerja sama daerah secara efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	12		4		8		5		0		17		141,67			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	0		0		0		0		1		1		100		
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			56.270.994		3.787.000		40.378.470		6.092.076		-		50.257.546	141,67	89,31		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	12		4		8		5		0		17		141,67			
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			38.560.000		-		-		8.960.063		28.138.591		37.098.654	100	96,21		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1		0		0		0		1		1		100			
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			381.723.875		7.000.000		14.498.000		83.427.979		50.962.476		155.888.455	116,67	40,84	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
			Meningkatnya efektivitas kebijakan perekonomian daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah (Persentase)	0											0				
				TINGKAT INFLASI DAERAH (Nilai)	2,94	2,04		1,87		1,87		2,92		2,92		2,92	99,32			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			321.693.979		4.200.000		12.430.000		59.935.617		34.549.271		111.114.888	75	34,54		
			Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah serta stakeholder dalam penguatan perekonomian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	1		1		1		0		3		150				
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			230.792.720		-		2.068.000		17.955.045		14.906.146		34.929.191	0	15,13		

			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1		0		0		1		0		0		0		
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			90.901.259		4.200.000		10.362.000		41.980.572		19.643.125		76.185.697	150	83,81	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2		1		1		1		0		3		150			
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			60.029.896		2.800.000		2.068.000		23.492.362		16.413.205		44.773.567	200	74,59		
			Tersedianya dukungan koordinasi dan pemantauan terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1		0		1		1		0		2		200			
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			60.029.896		2.800.000		2.068.000		23.492.362		16.413.205		44.773.567	200	74,59		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1		0		1		1		0		2		200			
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			547.063.130		11.600.000		316.168.650		127.937.970		361.828.684		817.535.304	66,67	149,44	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	INDEKS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA (Nilai)	59		0		0		0		87,1		87,1		147,63			
				Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	0		0		0		0		26		26		0			
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			547.063.130		11.600.000		316.168.650		127.937.970		361.828.684		817.535.304	66,67	149,44		
			Meningkatnya efisiensi belanja melalui proses pengadaan yang kompetitif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			195.668.610		2.800.000		59.412.550		121.020.000		63.932.230		247.164.780	100	126,32		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4		1		1		1		1		4		100			
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			351.394.520		8.800.000		256.756.100		6.917.970		297.896.454		570.370.524	100	162,32		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			-		-		-		-		-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	50		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			541.839.971		9.195.040		138.552.120		50.996.413		250.744.677		449.488.250	100	82,96	Bagian Organisasi	
			Meningkatnya Persentase Layanan Publik Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	0		0		0		0		4,04		4,04		0			
				NDEKS KELEMBAGAAN (Nilai)	70		0		0		0		72,05		72,05		102,93			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			541.839.971		9.195.040		138.552.120		50.996.413		250.744.677		449.488.250	100	82,96		
			Terlaksananya pengukuran dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100			

				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100				
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			167.021.015		681.540		59.301.499		16.653.417		53.789.409		130.425.865	100	78,09			
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2		0		2		0		0		2		100				
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			122.267.520		-		28.614.850		13.590.186		72.192.626		114.397.662	100	93,56			
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2		0		1		0		1		2		100				
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			124.139.298		6.355.995		9.863.300		17.286.985		56.699.888		90.206.168	100	72,67			
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		0		0		0		1		1		100				
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			99.542.125		1.306.135		39.682.471		2.267.100		44.953.651		88.209.357	100	88,62			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		0		1		0		0		1		100				
		4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			28.870.013		851.370		1.090.000		1.198.725		23.109.103		26.249.198	100	90,92			
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0		1		100				
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				43.559.656.780		5.892.114.841		22.326.923.011		7.731.338.017		6.143.788.374		42.094.164.243	92,33	96,64	Bagian Umum	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP (Persen)	90		100		100		100		100		100		111,11				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	0				3,96				3,96				0				
			4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.571.400.313		1.902.175.806		18.893.983.275		4.866.176.830		2.096.794.200		27.759.130.111	111,33	149,47		
			Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan rutin secara tertib dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	150		134		132		132		167		167		111,33				
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.571.400.313		1.902.175.806		18.893.983.275		4.866.176.830		2.096.794.200		27.759.130.111	111,33	149,47			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	150		134		132		132		167		167		111,33				
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			44.838.000		15.814.000		29.024.000		-		-		44.838.000	108,33	100			
			Terselenggarannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6		3		10		0		0		13		216,67				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			10			0				0				0						
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			44.838.000		15.814.000		29.024.000		-		-		44.838.000	216,67	100			
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6		3		10		0		0		13		216,67				
		4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-		-		-		-		-	0	0			
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0		0		0				
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.976.668.403		846.766.194		736.272.366		393.809.924		1.381.374.291		3.358.222.775	115,27	84,45			
			Tersedianya dukungan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		1		2		3		9		75				

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		3		2		0		2		7		140			
--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-----	--	--	--

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket	
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		1		4		5		3		13		108,33				
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14		1		3		8		2		14		100				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		12		30		81		30		153		153				
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		482.467.200		179.844.000		80.707.200		78.118.600		594.048.000		932.717.800	75	193,32				
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		1		2		3		9		75				
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		123.092.000		315.015.480		66.316.800		12.964.800		19.480.000		413.777.080	140	336,15				
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		3		2		0		2		7		140				
		4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1.331.000.000		100.000.000		110.453.000		157.361.000		419.196.000		787.010.000	108,33	59,13				
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		1		4		5		3		13		108,33				
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		276.157.850		39.700.000		96.286.235		61.735.635		39.462.000		237.183.870	100	85,89				
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14		1		3		8		2		14		100				
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.763.951.353		212.206.714		382.509.131		83.629.889		309.188.291		987.534.025	153	55,98				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		12		30		81		30		153		153				
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.732.417.750		5.494.393		53.474.576		339.861.344		202.029.787		600.860.100	50	34,68				
			Tersedianya barang milik daerah sesuai kebutuhan perangkat daerah dan pimpinan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0				
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		2		1		3		300				
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		99.000.000		-		-		-		-		-	0	0				
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0		0		0				
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-		-		-		-		-		-	0	0				
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0		0		0				
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		291.353.750		-		-		98.600.000		-		98.600.000	0	33,84				
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0				
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		917.100.000		-		49.400.000		165.000.000		-		214.400.000	0	23,38				

			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			22.500.000		-		-		-		-		-	0	0

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket			
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			402.464.000		5.494.393		4.074.576		76.261.344		202.029.787		287.860.100	300	71,52		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		2		1		3		300			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.434.907.938		1.452.999.261		895.889.654		886.880.301		588.630.810		3.824.400.026	100	70,37		
			Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		12		100					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		12		100					
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			38.008.000		-		13.008.000		-		10.008.000		23.016.000	100	60,56		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.915.607.900		315.015.480		8.399.500		334.377.768		347.755.299		1.005.548.047	100	52,49		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.481.292.038		1.137.983.781		874.482.154		552.502.533		230.867.511		2.795.835.979	100	80,31		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.124.869.191		315.611.900		584.826.290		303.441.442		522.453.881		1.726.333.513	147,22	24,23		
			Terpeliharanya kondisi sarana dan prasarana kerja perangkat daerah agar tetap laik pakai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		2		17		10		6		35		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		0		0		0		0							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		3		5		5		9		22		366,67			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		1		2		3		75			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		1		2		2		0			
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		168.233.500		25.560.000		156.705.000		250.277.781		600.776.281	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		2		17		10		6		35		0			
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.218.002.656		-		-		-		-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		0		0		0		0		0		0			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.491.544.946		56.284.000		87.426.890		121.757.250		191.976.100		457.444.240	366,67	18,36			

			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		3		5		5		9		22		366,67			
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.415.321.589		45.547.200		235.919.700		12.489.596		40.100.000		334.056.496	75	23,6		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		1		2		3		75			
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		45.547.200		235.919.700		12.489.596		40.100.000		334.056.496	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		1		2		2		0			
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			6.464.088.185		1.353.253.287		1.133.452.850		941.168.176		1.298.482.405		4.726.356.718	100	73,12		
			Tersedianya layanan kebutuhan operasional harian pimpinan secara optimal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2		2		100			
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2		2		100			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.704.297.007		423.657.759		136.757.473		136.757.472		335.475.793		1.032.648.497	100	60,59		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2		2		100			
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.759.791.178		929.595.528		996.695.377		804.410.704		963.006.612		3.693.708.221	100	77,6		
			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2		2		100			
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			210.467.000		-		-		-		54.023.000		54.023.000	35	25,67		
			Terpenuhinya kebutuhan logistik dan operasional rumah dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		1		1		20			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		1		1		50			
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			160.467.000		-		-		-		27.583.000		27.583.000	20	17,19		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		1		1		20			
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			50.000.000		-		-		-		26.440.000		26.440.000	50	52,88		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		1		1		50			
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			626.646.428		135.686.110		125.873.766		93.173.581		193.029.981		547.763.438	100	87,41	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			Meningkatnya Persentase agenda pimpinan daerah yang dipublikasikan secara terbuka melalui media resmi pemerintah	Persentase agenda pimpinan daerah yang dipublikasikan secara terbuka melalui media resmi pemerintah (Persentase)	0		25		25		25		25		100		0			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			626.646.428		135.686.110		125.873.766		93.173.581		193.029.981		547.763.438	100	87,41		
			Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		3		3		3		12		100					
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12		3		3		3		12		100					
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			338.979.053		76.246.110		80.899.752		40.189.500		111.922.981		309.258.343	100	91,23		

			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12		3		3		3		3	12		100			
	4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			147.102.281		43.160.000		5.720.000		33.890.700		53.634.000		136.404.700	100	92,73	
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		3		3		3		3	12		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12=11/6 x 100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			140.565.094		16.280.000		39.254.014		19.093.381		27.473.000		102.100.395	100	72,64		
			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12		3		3		3		3		12		100			
			JUMLAH			51.590.529.099		6.647.058.211		25.078.569.359		9.460.973.245		7.593.606.860		48.780.207.675				
			Rata-rata capaian kinerja (%)														87,63	94,55		SUB KEGIATAN
			Predikat kinerja														Tinggi	Sangat tinggi		
			Rata-rata capaian kinerja (%)														115,31			PROGRAM
			Predikat kinerja														Sangat tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : #Bagian Administrasi Pembangunan : Sudah ada Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD. # Bagian Tata Pemerintahan : Koordinasi intensif dan tersedianya sistem aplikasi pelaporan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan TAPEM (SILPD dan E-SPM). # Bagian Kesejahteraan Rakyat : kegiatan yang ada sudah terlaksanakan semua # Bagian Hukum : Meningkatkan SDM Pemprakarsa Produk Hukum di OPD # Bagian Kerja Sama : Dukungan Kepala Daerah dan mitra kerja sama. #Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam : Dukungan Penuh dari Kepala Daerah, DPRD, dan OPD terkait, Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia # Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : 1. Komitmen seluruh OPD 2. Sumber Daya Manusia 3. Anggaran # Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Koordinasi proaktif dari bagian dan OPD; Adanya tim maju dalam penyiapan acara pimpinan jika diawali dengan koordinasi proaktif dari bagian, OPD maupun instansi luar.																				

Faktor penghambat pencapaian kinerja	: # Bagian Administrasi Pembangunan : Penghimpunan data sering tidak tepat waktu oleh OPD. #Bagian Tata Pemerintahan : Terbatasnya anggaran;Administrasi kewilayahan tidak mendapatkan alokasi anggaran; Sebagian besar kecamatan belum mengadakan PATEN (Hanya 4 kecamatan dari 17 kecamatan) #Bagian Kesejahteraan Rakyat : Koordinasi Internal maupun Eksternal belum efektif, jabatan struktural dalam organisasi, dan Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten sehingga dapat menghambat efektifitas, efisiensi dan realisasi kegiatan. # Bagian Hukum : Kurangnya SDM pada OPD Pemrakarsa Produk Hukum dan terbatasnya anggaran # Bagian Kerja Sama : a). Â Â Kurangnya SDM dalam mengelola kerjasama; b). Â Â Tidak terlaksananya tindak lanjut kerja sama yang telah direncanakan dalam MoU; c). Â Â Tidak adanya laporan tindak lanjut dari OPD terkait pelaksanaan kerjasama. #Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam : Belum Optimalnya Koordinasi antar OPD dan belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah # Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : 1. Inkonsistensi OPD 2. Struktur SDM Fungsional PBJ terbatas 3. Anggaran terbatas #Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Koordinasi yang tidak intens dalam penjadwalan kegiatan pimpinan (Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah) dari OPD atau lintas sektor sehingga berdampak terhadap realisasi kegiatan pimpinan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: #Bagian Kesejahteraan Rakyat : memaksimalkan potensi dan anggaran serta memperbaiki Komunikasi, koordinasi agar kegiatan terlaksana dengan efektif, efisien dan produktif # Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : 1. Koordinasi dengan OPD dan dibantu dengan intervensi pimpinan 2. Penambahan Fungsional PBJ melalui pengadaan CPNS 3. Tersedianya anggaran yang cukup # Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	# Bagian Administrasi Pembangunan : Komitmen penuh OPD untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perbup tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan tentang Pedoman Pelaksanaan APBD. #Bagian Tata Pemerintahan : Penyiapan sarana prasarana dan SDM dalam pelaksanaaan PATEN kecamatan; Penyediaan sistem digital dalam pelaksanaan PATEN; Perlu pelatihan untuk SDM supaya tetap adaptif dengan perkembangan. #Bagian Kesejahteraan Rakyat : Untuk memaksimalkan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT perlu Penambahan Sub Kegiatan atau Memperjelas Sub Kegiatan #Bagian Hukum : Pembuatan aplikasi untuk memudahkan alur kerja dalam proses penyusunan produk hukum # Bagian Kerja Sama : a). Â OPD menyampaikan data kerjasama secara rutin dan koordinasi intensif antar pihak yang terkait; b). Â Â Pemerintah daerah dan mitra kerjasama berupaya merealisasikan MoU ke dalam PKS. #Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam : Memperkuat koordinasi anta OPD terkait dan mendorong optimalisasi potensi daerah serta ketersediaan anggaran yang cukup # Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : 1. Menjaga konsistensi setiap OPD 2. Mengajukan penambahan SDM Jafung PBJ 3. Mengajukan kecukupan anggaran #Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Tindak Lanjut yang dibutuhkan untuk Pencapaian Target Kinerja RKPD Berikutnya Peningkatan anggaran;
---	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan capaian indikator kinerja program, secara umum kinerja Sekretariat Daerah menunjukkan hasil yang cukup baik, di mana sebagian besar indikator telah mencapai atau bahkan melampaui target tahunan, seperti Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah (143%), Persentase produk hukum daerah yang terdigitalisasi dan dapat diakses publik (185%), Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (116%), serta Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan (102%).

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, terutama Persentase keterlaksanaan kegiatan strategis daerah (60%), Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (90%), serta beberapa indikator lain yang masih berada pada kisaran 96–99%, sehingga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan program, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan koordinasi agar seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan capaian indikator kegiatan, secara umum pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, di mana sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Indikator dengan capaian optimal antara lain Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (100%), Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%), serta beberapa kegiatan yang melampaui target seperti Penataan Organisasi (125%), Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (106,67%), dan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (105,42%).

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan perhatian dan percepatan, terutama Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (20,00%), Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (31,25%), Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah (52,56%), serta Administrasi Umum Perangkat Daerah (86,67%) yang belum mencapai target. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, percepatan proses pengadaan dan pemeliharaan aset, serta penguatan pengendalian pelaksanaan program agar seluruh indikator kegiatan dapat tercapai secara optimal hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.5
Evaluasi Terhadap Capaian Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
A	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	59,473,426,745.00	46,675,976,302.00	78.5%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230,184,320.00	105,782,728.00	46.0%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,427,518,036.00	20,730,789,949.00	92.4%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,715,000.00	22,796,590.00	82.3%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,726,369,128.00	4,550,996,426.00	79.5%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,944,325,820.00	856,755,674.00	29.1%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,231,899,828.00	5,685,308,353.00	91.2%
7	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,595,886,410.00	5,340,280,561.00	62.1%
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,670,823,396.00	7,468,968,017.00	70.0%
9	Penataan Organisasi	1,175,066,362.00	809,492,604.00	68.9%
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,443,638,445.00	1,104,805,400.00	76.5%
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14,416,401,962.00	12,206,563,913.00	84.7%
11	Administrasi Tata Pemerintahan	937,424,646.00	678,405,403.00	72.4%
12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11,927,770,675.00	10,537,831,427.00	88.3%
13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	990,977,831.00	649,504,954.00	65.5%
14	Fasilitasi Kerjasama Daerah	560,228,810.00	340,822,129.00	60.8%
C	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3,072,984,150.00	2,111,380,894.00	68.7%
15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	327,518,800.00	245,356,729.00	74.9%
16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,005,413,000.00	586,069,690.00	58.3%
17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,587,306,680.00	1,151,601,361.00	72.6%
18	Pemantauan Kebijakan SDA	152,745,670.00	128,353,114.00	84.0%
	JUMLAH ANGGARAN	76,962,812,857.00	60,993,921,109.00	79.3%

Secara umum kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp60.993.921.109,00** atau **79,3% dari total pagu sebesar Rp76.962.812.857,00**.

Dari sisi program, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mencatat kinerja terbaik dengan tingkat realisasi 84,7%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan koordinasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan relatif efektif sesuai rencana.

Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai program dengan porsi anggaran terbesar mencapai realisasi 78,5%, sehingga secara signifikan memberikan kontribusi terhadap capaian realisasi anggaran Sekretariat Daerah secara keseluruhan. Adapun Program Perekonomian dan Pembangunan memperoleh realisasi 68,7%, lebih rendah dibandingkan dua program lainnya, yang mengindikasikan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir periode pelaporan.

Apabila ditinjau lebih rinci pada tingkat kegiatan, terdapat variasi capaian yang cukup lebar, mulai dari 29,1% hingga 92,4%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program belum merata di seluruh unit kerja. Beberapa kegiatan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat realisasi di atas 90%, mencerminkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang efektif.

Namun demikian, masih terdapat kegiatan dengan realisasi relatif rendah, terutama yang berada pada kisaran 29,1%, 46,0%, dan 58,3%, yang berpotensi memengaruhi capaian program secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada periode perencanaan berikutnya diperlukan penguatan kualitas perencanaan kegiatan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan koordinasi lintas unit kerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala agar kendala pelaksanaan dapat

diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih dini. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sekaligus memastikan bahwa realisasi keuangan berjalan seiring dengan pencapaian target kinerja organisasi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap visi misi Kepala Daerah Kabupaten Natuna, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan Pembangunan di Kabupaten Natuna yaitu:

a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal dan perlu mendapat perhatian serius, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil Pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/ *asset* pemerintah daerah, kurangnya kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kurang optimalnya penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan pengadaan barang dan jasa.

b) Kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Kabupaten Natuna diantaranya dilaksanakan melalui pembinaan mental keagamaan. Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku bermoral.

c) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi perumusan kebijakan kesejahteraan Masyarakat dan sosial

Kesejahteraan Masyarakat tidak terlepas dari isu kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan ditandai dengan naiknya angka kemiskinan Kabupaten Natuna. Pengangguran di Kabupaten Natuna mengalami sedikit penurunan. Angka kemiskinan dan Pengangguran yang ada menyebabkan pemerataan kesejahteraan / distribusi pendapatan dan ketimpangan cukup tinggi, hal ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan sinergitas perumusan kebijakan dalam penanganan dan peningkatan masalah kesejahteraan sosial.

d) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi perumusan penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal

Isu penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada peningkatan potensi sumber daya lokal menjadi hal yang paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Penguatan potensi ini dilakukan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah agar mampu bertahan dan bertumbuh sebagai penopang perekonomian daerah.

Belum optimalnya perumusan kebijakan penguatan perekonomian menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan Kabupaten lain yang ada di Propinsi Kepulauan Riau.

2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan kebijakan bina mental spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Rancangan Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara racangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan rill Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses pembangunan daerah diperlukan partisipatif dari masyarakat sebagai bentuk keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan. Proses partisipatif ini dilakukan dalam bentuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan (msrenbang) ditingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Dalam pelaksanaan proses Musrenbang di tingkat Kecamatan, terdapat beberapa usulan kegiatan dari Masyarakat/desa ke Sekretariat Daerah diantara ditujukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. Untuk lebih jelas disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 2.6
Usulan Partisipatif Dari Masyarakat Tahun 2027

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Pembangunan Surau Al-Mukaramah Desa Cera Bunguran Timur Laut	200.000.000,-	
2	Lanjutan pembangunan Masjid Al-Istiqomah Desa Sedarat Baru Kec. Bunguran Barubi	-	

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET
1	2	3	4
3	Pemasangan Paving Blok Masjid AL-IHYAK Desa Air Payang Kec.Pulau Laut	-	
4	Pembangunan Tempat parkir Masjid Al-Ihya RT.03/ RW.02 Desa Air Payang Kec. Pulau Laut	-	
5	Pembangunan pagar surau Al- Fauzu Air Bunga RT.04/ RW.01 Desa Air Payang Kec. Pulau Laut	-	
6	Pembangunan tempat parkir parkir Surau Al-Fauzu Air Bunga RT.04/ RW.01 Desa Air Payang	-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional pada tahun anggaran 2027 diarahkan pada tema "**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.**" Sebagai tahun ketiga dalam siklus RPJMN 2025–2029, periode ini memegang peranan krusial sebagai fase transisi dari peletakan fondasi menuju akselerasi transformasi struktural.

Fokus utama kebijakan dipusatkan pada penguatan produktivitas nasional (*Total Factor Productivity*) yang didorong oleh hilirisasi sumber daya alam strategis dan integrasi ekonomi digital di berbagai sektor unggulan. Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah menekankan pada sinkronisasi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan penguatan sistem Kesehatan dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Strategi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mempersempit ketimpangan antarwilayah, selaras dengan koridor pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 3.1

Keselarasan Sasaran Renstra Kemendagri, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Sekretariat Daerah Kab. Natuna

Fokus Kebijakan Nasional (RKP 2027)	Arah Kebijakan Pemerintah Daerah (RKPD 2027)	Bentuk Program/Kegiatan Strategis Daerah
Transformasi Ekonomi & Hilirisasi	Optimalisasi manajemen aset dan pendapatan daerah (BUMD).	Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja BUMD agar selaras dengan target pembangunan daerah dan peningkatan PAD.
Penguatan SDM Berkualitas	Pengoordinasian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lintas sektor.	Fasilitasi penyusunan rencana aksi SPM dan pemantauan efektivitas belanja urusan wajib pada Perangkat Daerah terkait (Pendidikan/Kesehatan).
peningkatan Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Penguatan transparansi dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah.	Pengoordinasian perluasan penggunaan e-purchasing (Toko Daring/Katalog Lokal) dan penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Transformasi Digital (GovTech)	Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lincah.	Asistensi dan evaluasi SAKIP/RB pada seluruh OPD, serta pengoordinasian integrasi data melalui kebijakan Satu Data Daerah.
Ketahanan Ekonomi Hijau	Penguatan regulasi dan iklim investasi di tingkat daerah,	Penyusunan regulasi (Perkada/Perda) kemudahan investasi dan pengoordinasian kerja sama antar daerah/pihak ketiga dalam pemanfaatan aset daerah.

3.2 Telaahan Terhadap RPJMD Kabupaten Natuna Periode 2025-2029

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, berikut adalah ringkasan fokus dan arah pembangunan Kabupaten Natuna untuk lima tahun ke depan:

- a) Fokus Pembangunan (Isu Strategis): Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan beberapa fokus utama yang menjadi prioritas dalam periode 2025-2029 untuk menjawab tantangan daerah:
- b) Optimalisasi Hilirisasi & Investasi: Mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- c) Pembangunan SDM Unggul: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan (terutama vokasi), kesehatan, dan penguatan karakter yang berbasis pada nilai budaya Melayu dan wawasan kebangsaan.
- d) Infrastruktur & Konektivitas: Mempercepat pemerataan sarana prasarana fisik dan digital untuk menghubungkan antarwilayah serta mendukung distribusi logistik.
- e) Transformasi Digital: Optimalisasi teknologi informasi dalam layanan publik melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan efisien.
- f) Lingkungan & Mitigasi Bencana: Penguatan kebijakan pembangunan berkelanjutan, konservasi air, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana gelombang ekstrem dan abrasi pantai.

Arah kebijakan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Reformasi Birokrasi: Mengalihkan tata kelola pemerintahan dari manual ke digital sebagaimana yang tertuang dalam sasaran RPJMD Kabupaten Natuna.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan

tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif mendukung mewujudkan misi 4: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.***

Untuk terwujudnya visi misi Kabupaten Natuna RPJMD tahun 2025-2029 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna menetapkan 1 (satu) tujuan yang merupakan turunan dari sasaran misi pada RPJMD seperti yang terlihat pada gambar 1 (satu).

Gambar 3.1
Tujuan Resntra Sekretariat Daerah



Tujuan strategis dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini dilaksanakan secara sistematis melalui penguatan tata kelola berbasis data, integrasi

sistem informasi kinerja, serta fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka mendukung transparansi, efisiensi, dan responsivitas pelayanan. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui dua indikator utama, yaitu:

- 1) Indeks Pelayanan Publik sebagai representasi mutu layanan kepada masyarakat, dan
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai cerminan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut, Rencana Strategis Sekretariat Daerah menetapkan dua sasaran utama yang saling menguatkan.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu:

- a) Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat di atas 70
- b) Persentase UPP yang memperoleh kategori minimal Baik (B)
- c) Indeks Kualitas Kebijakan
- d) Indeks Reformasi Hukum

Sasaran 2: Memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

- a) Indeks Tata Kelola Pengadaan
- b) Indeks Akses Keuangan Daerah

Gambar 3.2
Tujuan, Sasaran dan Target Indikator



Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra

TUJUAN RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR	TERGET	Definisi Indiktor
			2027	
(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi		Nilai SAKIP Daerah	75,00	Ukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
		Indeks Pelayanan Publik	4,48	Ukuran kuantitatif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayanan pemerintah daerah, berdasarkan aspek-aspek standar pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.
	Meningkatnya kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP dengan Predikat >70	75%	Ukuran proporsi perangkat daerah yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP di atas 70 (predikat minimal “BB”) dari total seluruh perangkat daerah yang dievaluasi dalam satu tahun anggaran.
		Persentase UPP yang memperoleh kategori minimal Baik (B)	50%	Ukuran proporsi UPP yang mendapatkan nilai evaluasi pelayanan publik dengan kategori minimal “Baik” (nilai 70–80) berdasarkan hasil penilaian internal atau eksternal sesuai standar Kementerian PANRB.
		Indeks Kualitas Kebijakan	68,35	Ukuran kuantitatif terhadap mutu proses dan hasil kebijakan publik yang dihasilkan oleh perangkat daerah, mencakup aspek relevansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan kebijakan. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen evaluasi dari LAN atau penilaian mandiri yang terstandarisasi.
		Indeks Reformasi Hukum	87,30	Ukuran tingkat pelaksanaan reformasi hukum oleh pemerintah daerah, mencakup identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi dan simplifikasi peraturan, penguatan sistem regulasi nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM setiap tahun.
	Memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data	Indeks Tata Kelola Pengadaan	81,80	Ukuran kuantitatif terhadap kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen evaluasi dari LKPP.
		Indeks Akses Keuangan Daerah	4,34	Ukuran komposit terhadap tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di suatu daerah, mencakup dimensi ketersediaan, pemanfaatan, dan kualitas layanan keuangan. Laporan IKAD dari OJK

Tabel 3.3**Kebijakan, Program Aktifitas dan Kegiatan Aktifitas**

Sasaran	Kebijakan	Program Aktifitas	Kegiatan Aktivitas
Meningkatnya kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, peningkatan kualitas kebijakan publik, reformasi birokrasi, serta digitalisasi pelayanan publik.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah 2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Perangkat Daerah 3. Pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik dan Zona Integritas 4. Penguatan sistem pelayanan publik berbasis elektronik. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas kebijakan daerah.
Memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data	Penguatan koordinasi pembangunan daerah melalui pemanfaatan data, peningkatan kualitas pengendalian pembangunan, optimalisasi tata kelola pengadaan, serta perluasan akses keuangan daerah.	Penguatan Koordinasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah	1. Koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data. 3. Fasilitasi perumusan kebijakan perekonomian daerah 4. Pembinaan tata kelola pengadaan barang dan jasa. 5. Fasilitasi pengembangan akses keuangan daerah dan pemberdayaan ekonomi.

Tabel 3.4**Indikator Sasaran Program Sekretariat Daerah**

Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2027
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan fasilitasi dan pengendalian terhadap kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Pelayanan publik perangkat daerah	4.2
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	72.00
	3. Meningkatkan Pelayanan Keprotokolan Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan yang terdokumentasi dan terarsip digital	100%
	4. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai IKM	85.00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan	1. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dan telah terdigitalisasi serta dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah	Persentase Produk Hukum Daerah telah dipublikasi dan bisa diakses publik	78
	2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPDD)	3.00
	3. Tersedianya dukungan kebijakan dan fasilitasi yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakat berbasis nilai keagamaan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%
Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan perekonomian daerah	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan perekonomian dan Pembangunan	100%
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	26.50
	3. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan strategis daerah	Tingkat keterlaksanaan kegiatan strategis daerah	100%

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	(10)
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Nilai	26,50	PBJ
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai	18,30	PBJ
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	40,00	PBJ
4	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	94,55	Organisasi
5	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	52,61	Organisasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Program

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya:

- 1) Mempedomani Resntra Sekretariat Daerah 2025-2029.
- 2) Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi.
- 3) Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka Pembangunan daerah.
- 4) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah
- 5) Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu strategis Sekretariat Daerah
- 6) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efiseinsi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemerintah Daerah menempatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus diwujudkan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan Kepala Daerah, Sekretariat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan program yang mendukung peningkatan kualitas keagamaan, pendidikan, serta kompetensi masyarakat. Dalam

konteks tersebut, pengembangan Qur'an Center bagi santri-santri dari kecamatan menjadi program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat pembinaan calon peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), guna meningkatkan prestasi daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain itu, Sekretariat Daerah berperan dalam mendorong gerakan literasi Al-Qur'an melalui Gerakan Magrib Mengaji, yang ditetapkan sebagai salah satu gerakan sosial keagamaan prioritas dengan target pembinaan minimal 500 peserta setiap tahun. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan nilai-nilai spiritual masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter generasi muda. Di bidang pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah juga melaksanakan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah dengan target 80 peserta per tahun, yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelayanan sosial keagamaan di lingkungan masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi masyarakat daerah, Sekretariat Daerah memfasilitasi penyediaan beasiswa perguruan tinggi melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi nasional. Program ini dirancang untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi putra-putri daerah, sekaligus mengembangkan SDM unggul yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan jangka menengah daerah. Keempat program prioritas tersebut merupakan bagian integral dari upaya Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui tata kelola program yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 4.1
Program Prioritas Kepala Daerah

No	Nama Program	Penanggung Jawab
1	Qur'an Center,	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Gerakan Magrib Mengaji	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	Beasiswa Perguruan Tinggi	Kerjasama Daerah

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 3 program dan 18 kegiatan dan 45 Sub kegiatan
2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2027 adalah sebesar **Rp62,510,733,000,00** yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna. Adapun rekapitulasi program kegiatan dan pendanaan tahun 2027 disajikan dalam tabel pada lampiran.

4.2. Cascading dan Crosscutting

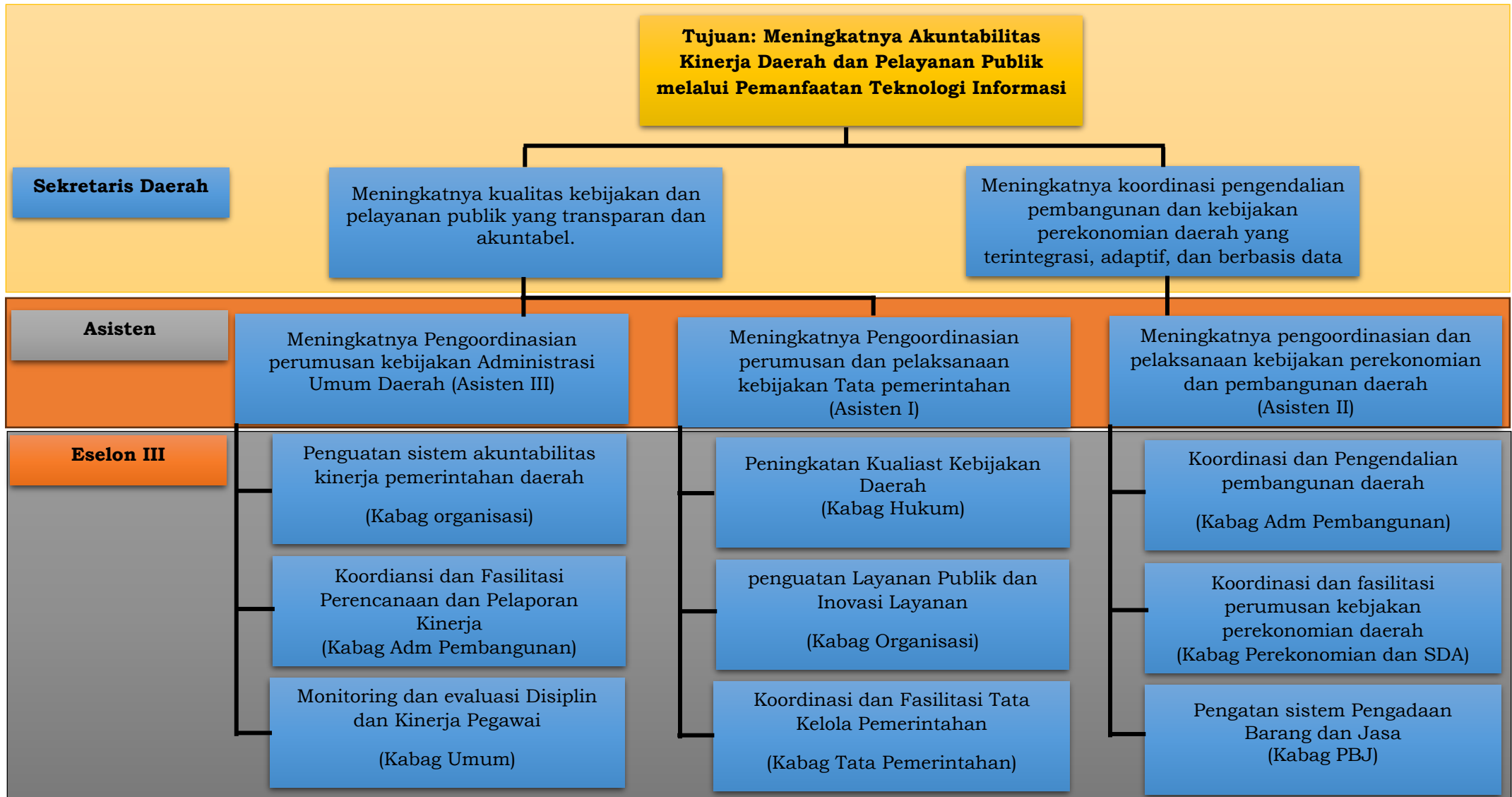
Struktur cascading kinerja Sekretariat Daerah pada gambar di atas menggambarkan alur logis hubungan antara tujuan strategis, sasaran, dan indikasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing level jabatan, mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten, hingga Eselon III. Pada level tertinggi, Sekretaris Daerah menetapkan tujuan strategis yaitu ***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.”*** Tujuan ini menjadi arah umum bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap perangkat daerah, khususnya terkait peningkatan tata

kelola pemerintahan, kualitas kebijakan, serta efektivitas pembangunan daerah.

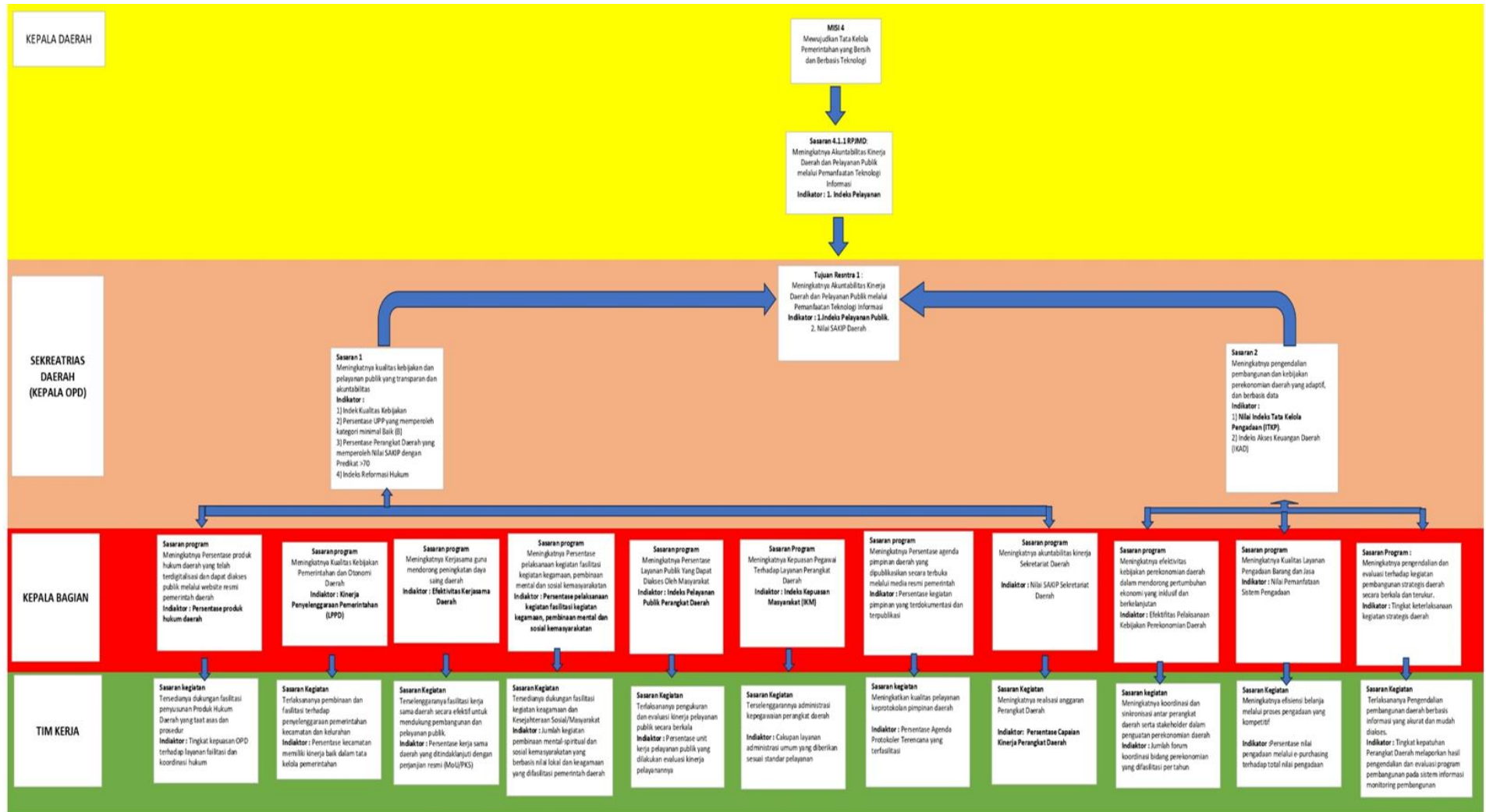
Pada level Eselon II (Asisten), tujuan strategis tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran utama yang lebih operasional, yaitu: peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang terintegrasi; peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui koordinasi, fasilitasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan; serta penguatan koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi dan berbasis data. Masing-masing sasaran ini menunjukkan fokus pembinaan dan pengendalian oleh Asisten sesuai bidang tugasnya, yaitu Administrasi Umum, Tata Pemerintahan, serta Perekonomian dan Pembangunan.

Selanjutnya, pada level Eselon III, sasaran tersebut diterjemahkan menjadi keluaran yang lebih teknis dalam bentuk program dan kegiatan. Keluaran tersebut meliputi: penguatan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah, koordinasi perencanaan dan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, peningkatan kualitas kebijakan daerah, penguatan layanan publik dan inovasi layanan, fasilitasi tata kelola pemerintahan, koordinasi pembangunan daerah, fasilitasi perumusan kebijakan perekonomian, serta penguatan sistem evaluasi dan monitoring pembangunan. Dengan demikian, cascading ini menunjukkan kesinambungan antara tujuan strategis hingga kegiatan operasional, sehingga memastikan bahwa setiap level organisasi bekerja secara terpadu untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Gambar 4.1
Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029



Gambar 4.2
Pernjenjangan Kinerja Sekretariat Daerah



Crosscutting dalam birokrasi pemerintahan merupakan pendekatan koordinatif yang digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan, irisan tugas, serta kontribusi antar-unit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui mekanisme ini, setiap perangkat daerah dapat melihat dengan jelas bagaimana perannya berhubungan atau beririsan dengan peran unit kerja lain, baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan program, maupun pencapaian sasaran kinerja. Dengan demikian, crosscutting menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program prioritas kepala daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan secara terintegrasi dan saling menguatkan. Penyusunan matrik crosscutting diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antar-fungsi dalam organisasi, khususnya dalam hal pelaksanaan program prioritas yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah. Melalui matrik ini, pemerintah daerah dapat memetakan peran koordinatif, administratif, maupun teknis yang diemban oleh masing-masing unit kerja sehingga mengurangi potensi tumpang tindih serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Selain itu, matrik crosscutting juga bermanfaat sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi, karena memberikan dasar yang lebih sistematis dalam menilai kontribusi antar-unit terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan demikian, crosscutting menjadi instrumen yang tidak hanya mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga memastikan sinergi yang berkesinambungan antar-unit kerja sesuai mandat organisasi

Tabel 4.2
Crosscutting Issu Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Sasaran Kinerja Sekretaris Daerah	Arah Kebijakan dan Strategi	Area Kolaborasi	Peran Utama	Unit Kerja Terkait
1. Meningkatnya kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Integrasi SAKIP, harmonisasi indikator, sinkronisasi perencanaan–pelaporan	Menyusun, mengharmonisasi, dan mengawal akuntabilitas kinerja PD	Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan, Inspektorat
	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Penyusunan RKPD, Renja, cascading kinerja, laporan LKjIP	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan & laporan kinerja	Bagian Perencanaan, Bagian Organisasi, PD teknis
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja PD	Monev, evaluasi capaian, validasi data, penyusunan rekomendasi	Melaksanakan monev dan memberikan rekomendasi kebijakan	Bagian Administrasi Pembangunan, Inspektorat, Bagian Perencanaan
	Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah	Penyusunan kebijakan berbasis data, FGD, harmonisasi kebijakan	Memfasilitasi penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas regulasi	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi
	Penguatan Layanan Publik dan Inovasi Layanan	Reformasi birokrasi, standar pelayanan, inovasi layanan, digitalisasi	Pengembangan & fasilitasi inovasi layanan publik	Bagian Organisasi, Diskominfo, OPD penyelenggara layanan
	Koordinasi dan Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan	Penataan kelembagaan, SOP, tata kelola berbasis good governance	Memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai regulasi	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
2. Memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data	Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Monev pembangunan, konsolidasi data program-kegiatan, evaluasi pembangunan	Mengendalikan target pembangunan daerah & memantau kemajuan	Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bappeda, OPD teknis
	Koordinasi dan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Sinkronisasi kebijakan sektoral ekonomi, konsolidasi data, rapat lintas sektor	Fasilitasi perumusan kebijakan ekonomi daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bappeda
	Penguatan Sistem Evaluasi dan Monitoring Pembangunan	Dashboard data pembangunan, evaluasi berbasis data, rekomendasi strategis	Mengembangkan sistem evaluasi pembangunan terpadu	Bagian Administrasi Pembangunan, Diskominfo, Bagian SDA

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2027, merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2027, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2027. Dalam penutup dokumen Rencana Kerja tahun 2027 ini, kami menegaskan komitmen untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan sebaik-baiknya. Rencana ini merupakan hasil dari proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan rencana kerja ini akan menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dan stakeholder lainnya sangat diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin bahwa semua tantangan dapat dihadapi dan diatasi secara efektif.

Selanjutnya, kami berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Natuna dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja ini. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan rencana kerja ini sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2027 harus dapat berfungsi sebagai:

- 1) Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2027 baik dalam lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan.

- 2) Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan bersama.
- 3) Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2027 ini. Semoga rencana ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Natuna



Ranai, 13 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH

BOY WIJANARKO VARIANTO, S.E

Pemnina Utama Madya/IV

NIP. 19770809 200212 1 005

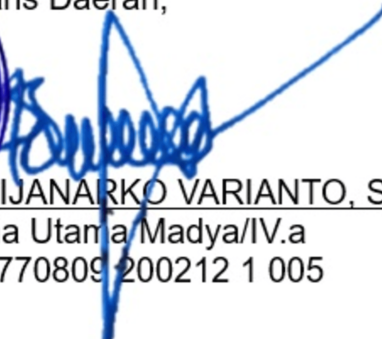
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KAB. NATUNA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Tata Pemerintahan						440.543.000,00								0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						440.543.000,00								0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						440.543.000,00								0,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						440.543.000,00								0,00	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah						440.543.000,00								0,00	
			999.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3.20 Skor		2.95 Skor	2.99 Skor	440.543.000,00							3.00 Skor	0,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						440.543.000,00						-		0,00	
		Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan						440.543.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	182.144.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	131.651.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	126.748.000,00							1 Dokumen	0,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						131.651.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			0,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	131.651.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						126.748.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	126.748.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Bagian Tata Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						182.144.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	182.144.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Bagian Tata Pemerintahan
	J U M L A H							440.543.000,00								0,00	

Ranai, 3 Agustus 2026

Secretaris Daerah,



RGY WIJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama Madya/IV.a

NIP. 19770809 200212 1 005

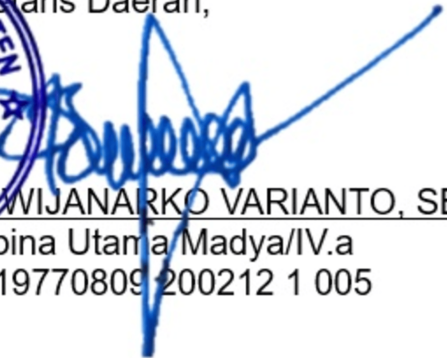
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN HUKUM KAB. NATUNA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Hukum						343.500.000,00								748.390.967,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						343.500.000,00								748.390.967,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						343.500.000,00								748.390.967,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						343.500.000,00								748.390.967,00	
		Meningkatnya Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah						343.500.000,00								748.390.967,00	
			999.Persentase produk hukum daerah yang telah terdigitalisasi dan dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah	100 %		50 %	58 %	343.500.000,00							75 %	748.390.967,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						343.500.000,00						-		748.390.967,00	
		Tersedianya dukungan fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah yang taat asas dan prosedur						343.500.000,00						-		748.390.967,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus		3 Kasus	3 Kasus	150.888.600,00							3 Kasus	126.990.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen		190 Dokumen	195 Dokumen	183.191.000,00							200 Dokumen	457.340.967,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	200 Dokumen		190 Dokumen	195 Dokumen	9.420.400,00							200 Dokumen	164.060.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						183.191.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			457.340.967,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen		190 Dokumen	190 Dokumen	183.191.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					200 Dokumen	457.340.967,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						150.888.600,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			126.990.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus		3 Kasus	3 Kasus	150.888.600,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Kasus	126.990.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						9.420.400,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			164.060.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	200 Dokumen		190 Dokumen	190 Dokumen	9.420.400,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					200 Dokumen	164.060.000,00	Bagian Hukum
	J U M L A H							343.500.000,00								748.390.967,00	

Ranai, 3 Agustus 2026

Sekretaris Daerah,



RGY WIJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama Madya/IV.a

NIP. 19770809 200212 1 005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KAB. NATUNA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Kesejahteraan Rakyat						12.078.280.000,00								15.947.900.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						12.078.280.000,00								15.947.900.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						12.078.280.000,00								15.947.900.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						12.078.280.000,00								15.947.900.000,00	
		Meningkatnya Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan kegamaan, pembinaan mental dan sosial kemasyarakatan						12.078.280.000,00								15.947.900.000,00	
			999.Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kegiatan kegamaan, pembinaan mental dan sosial kemasyarakatan	100 %		85 %	88 %	12.078.280.000,00							90 %	15.947.900.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						12.078.280.000,00						-		15.947.900.000,00	
		Tersedianya dukungan fasilitasi kegiatan keagamaan dan Kesejahteraan Sosial/Masyarakat						12.078.280.000,00						-		15.947.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	5.928.318.000,00							7 Dokumen	10.974.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	6.149.962.000,00							3 Dokumen	4.973.900.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						5.928.318.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			10.974.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen		6 Dokumen	9 Dokumen	5.928.318.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Dokumen	10.974.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						6.149.962.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			4.973.900.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	6.149.962.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	4.973.900.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	J U M L A H							12.078.280.000,00								15.947.900.000,00	

Ranai, 3 Agustus 2026

Setretaris Daerah,



BOY WIJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama Madya/IV.a

NIP. 19770809 200212 1 005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN KERJA SAMA KAB. NATUNA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Kerja Sama						200.000.000,00								980.564.640,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						200.000.000,00								980.564.640,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						200.000.000,00								980.564.640,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						200.000.000,00								980.564.640,00	
		Meningkatnya Kerjasama guna mendorong peningkatan daya saing daerah						200.000.000,00								980.564.640,00	
			2.Efektifitas Kerjasama Daerah	100 %		83 %	86 %	200.000.000,00							88 %	980.564.640,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						200.000.000,00						-		980.564.640,00	
		Terselenggaranya fasilitasi kerja sama daerah secara efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.						200.000.000,00						-		980.564.640,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	88.059.000,00							10 Dokumen	588.344.640,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	111.941.000,00							Laporan	392.220.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						88.059.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			588.344.640,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	88.059.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Dokumen	588.344.640,00	Bagian Kerja Sama

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						111.941.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			392.220.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	111.941.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					Laporan	392.220.000,00	Bagian Kerja Sama
	J U M L A H							200.000.000,00							980.564.640,00		

Ranai, 3 Agustus 2026

Secretaris Daerah,



BOY WIJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama Madya/IV.a

NIP. 19770809 200212 1 005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM KAB. NATUNA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam						502.619.000,00								1.506.789.758,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						502.619.000,00								1.506.789.758,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						502.619.000,00								1.506.789.758,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						502.619.000,00								1.506.789.758,00	
		Meningkatnya efektivitas kebijakan perekonomian daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan						502.619.000,00								1.271.193.172,00	
			2.Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah	100 Persentase		70 Persentase	80 Persentase	502.619.000,00							90 Persentase	1.271.193.172,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						354.366.000,00						-		1.271.193.172,00	
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah serta stakeholder dalam penguatan perekonomian daerah						354.366.000,00						-		1.271.193.172,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	54.388.800,00							4 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	155.083.200,00							2 Dokumen	535.596.586,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	144.894.000,00							12 Laporan	235.596.586,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						155.083.200,00			-	-	-			535.596.586,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	155.083.200,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	535.596.586,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						144.894.000,00			-	-	-			235.596.586,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	144.894.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	235.596.586,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)						54.388.800,00			-	-	-			500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	54.388.800,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	500.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						148.253.000,00						-		235.596.586,00	
		Tersedianya dukungan koordinasi dan pemantauan terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam daerah						148.253.000,00						-		235.596.586,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	148.253.000,00							1 Dokumen	235.596.586,00	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						148.253.000,00			-	-	-			235.596.586,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	148.253.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	235.596.586,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	J U M L A H							502.619.000,00							1.506.789.758,00		

Ranai, 3 Agustus 2026

Sejabataris Daerah,



ROY WIJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama Madya/IV.a

NIP. 19770809 200212 1 005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KAB. NATUNA
TAHUN 2027

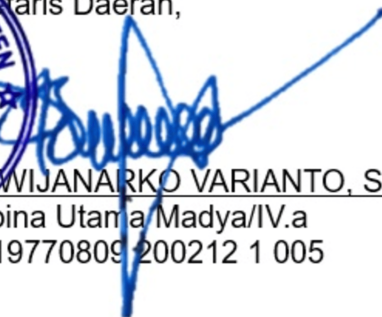
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Administrasi Pembangunan						450.000.000,00								893.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						450.000.000,00								893.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						450.000.000,00								893.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						140.335.700,00								200.000.000,00	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah						140.335.700,00								200.000.000,00	
			999.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.50 Nilai		68 Nilai	72.00 Nilai	140.335.700,00							72.50 Nilai	200.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						140.335.700,00						-		200.000.000,00	
		Meningkatnya realisasi anggaran dan kinerja Perangkat Daerah						140.335.700,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.005.700,00							1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.330.000,00							1 Laporan	50.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						120.005.700,00			-	-	Pengemban gan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola p emerintaha n yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangun an			150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.005.700,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	150.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.330.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	20.330.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kab. Natuna Kecamatan Bunguran Timur Kelurahan Ranai Kota 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	50.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						309.664.300,00								693.000.000,00	
		Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan strategis daerah secara berkala dan terukur.						309.664.300,00								693.000.000,00	
			999.Tingkat keterlaksanaan kegiatan strategis prioritas daerah	100 %		100 %	100 %	309.664.300,00							100 %	693.000.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						309.664.300,00						-		693.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian pembangunan daerah berbasis informasi yang akurat dan mudah diakses.						309.664.300,00						-		693.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.013.900,00							12 Laporan	370.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	164.650.400,00							Laporan	323.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						164.650.400,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			323.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	164.650.400,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					Laporan	323.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						145.013.900,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			370.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.013.900,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	370.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	J U M L A H							450.000.000,00							893.000.000,00		

Ranai, 3 Agustus 2026

Secretaris Daerah,



BGY WIJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama Madya/IV.a

NIP. 19770809 200212 1 005

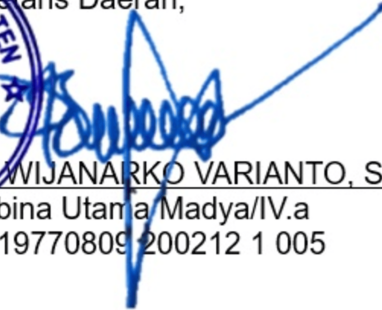
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KAB. NATUNA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						623.374.000,00								3.525.625.805,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						623.374.000,00								3.525.625.805,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						623.374.000,00								3.525.625.805,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						623.374.000,00								3.525.625.805,00	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa						623.374.000,00								3.525.625.805,00	
			2.Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	3055 Nilai		2592 Nilai	2605 Nilai	623.374.000,00							2735 Nilai	3.525.625.805,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						623.374.000,00						-		3.525.625.805,00	
		Meningkatnya efisiensi belanja melalui proses pengadaan yang kompetitif						623.374.000,00						-		3.525.625.805,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	190.068.000,00							12 Dokumen	2.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	383.306.000,00							12 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang		3 Orang	10 Orang	50.000.000,00							10 Orang	425.625.805,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						383.306.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			1.000.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	383.306.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	1.000.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						190.068.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			2.100.000.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen		Dokumen	205 Dokumen	190.068.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	2.100.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						50.000.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			425.625.805,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang		3 Orang	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Orang	425.625.805,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	J U M L A H							623.374.000,00								3.525.625.805,00	

Ranai, 3 Agustus 2026

Sejabataris Daerah,



RGY WIJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama Madya/IV.a

NIP. 19770809 200212 1 005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN ORGANISASI KAB. NATUNA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Organisasi						573.900.000,00								1.083.930.884,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						573.900.000,00								1.083.930.884,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						573.900.000,00								1.083.930.884,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						573.900.000,00								1.083.930.884,00	
		Meningkatnya Persentase Layanan Publik Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat						573.900.000,00								908.570.062,00	
			999.Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	4.75 Indeks		4.47 Indeks	4.48 Indeks	573.900.000,00							4.49 Indeks	908.570.062,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						573.900.000,00						-		1.083.930.884,00	
		Terlaksananya pengukuran dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala						573.900.000,00						-		1.083.930.884,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.870.000,00							2 Dokumen	151.108.418,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.145.000,00							1 Dokumen	175.360.822,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	162.490.000,00							2 Dokumen	309.440.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	175.050.000,00							1 Dokumen	175.360.822,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	131.345.000,00							2 Laporan	272.660.822,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						162.490.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			309.440.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	162.490.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	309.440.000,00	Bagian Organisasi

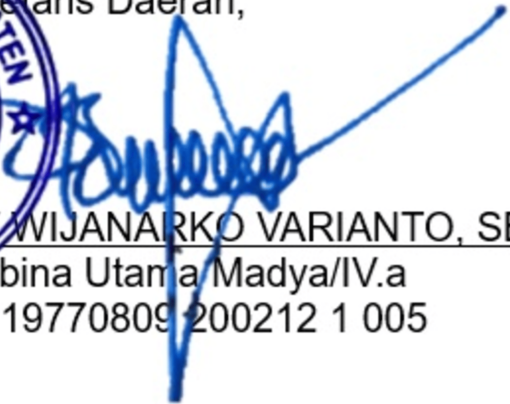
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						131.345.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			272.660.822,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	131.345.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	272.660.822,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						175.050.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			175.360.822,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	175.050.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	175.360.822,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						76.145.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			175.360.822,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.145.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	175.360.822,00	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						28.870.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			151.108.418,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	28.870.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	151.108.418,00	Bagian Organisasi
	J U M L A H							573.900.000,00								1.083.930.884,00	

Ranai, 3 Agustus 2026

Secretaris Daerah,





BOY WIJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama Madya/IV.a

NIP. 19770809 200212 1 005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN UMUM KAB. NATUNA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Umum						50.734.162.349,00								49.929.190.349,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						50.734.162.349,00								49.929.190.349,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						50.734.162.349,00								49.929.190.349,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						50.734.162.349,00								49.929.190.349,00	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah						50.734.162.349,00								49.929.190.349,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.53 Indeks		3.45 Indeks	3.47 Indeks	50.734.162.349,00							3.49 Indeks	49.929.190.349,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.444.688.189,00						-		19.444.688.189,00	
		Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan rutin secara tertib dan tepat waktu						19.444.688.189,00						-		19.444.688.189,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan		150 Orang/bulan	150 Orang/bulan	19.444.688.189,00							150 Orang/bulan	19.444.688.189,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.444.688.189,00			-	-	Pengemban gan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola p emerintaha n yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangun an			19.444.688.189,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan		150 Orang/bulan	164 Orang/bulan	19.444.688.189,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					150 Orang/bulan	19.444.688.189,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						147.433.800,00						-		147.433.800,00	
		Terselenggarannya administrasi kepegawaian perangkat daerah						147.433.800,00						-		147.433.800,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	147.433.800,00							6 Paket	147.433.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						147.433.800,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			147.433.800,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket		6 Paket	4 Paket	147.433.800,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	147.433.800,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.817.890.900,00						-		4.817.890.900,00	
		Tersedianya dukungan administrasi umum perangkat daerah						4.817.890.900,00						-		4.817.890.900,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.925.000,00							12 Laporan	200.925.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	940.250.000,00							12 Laporan	940.250.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	354.000.000,00							12 Paket	354.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	364.499.000,00							12 Paket	364.499.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	Paket	277.175.300,00							5 Paket	277.175.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.681.041.600,00							12 Paket	2.681.041.600,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						364.499.000,00			-	-	-			364.499.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	5 Paket	364.499.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	364.499.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						277.175.300,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			277.175.300,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	277.175.300,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Paket	277.175.300,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.681.041.600,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			2.681.041.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	2.681.041.600,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	2.681.041.600,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						354.000.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			354.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	5 Paket	354.000.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	354.000.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						200.925.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			200.925.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	47 Laporan	200.925.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	200.925.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						940.250.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			940.250.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	98 Laporan	940.250.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	940.250.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.988.168.000,00						-		4.988.168.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah sesuai kebutuhan perangkat daerah dan pimpinan						4.988.168.000,00						-		4.988.168.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	918.832.000,00							5 Unit	918.832.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	690.470.000,00							5 Unit	690.470.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	271.200.000,00							1 Unit	271.200.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.402.448.000,00							1 Unit	2.402.448.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	705.218.000,00							5 Unit	705.218.000,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.402.448.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			2.402.448.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	6 Unit	2.402.448.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	2.402.448.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						918.832.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			918.832.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	15 Unit	918.832.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	918.832.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						705.218.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			705.218.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	15 Unit	705.218.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	705.218.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						690.470.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			690.470.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	13 Unit	690.470.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	690.470.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						271.200.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			271.200.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	3 Unit	271.200.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	271.200.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.538.867.200,00						-		5.538.867.200,00	
		Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						5.538.867.200,00						-		5.538.867.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.229.480.400,00							12 Laporan	2.229.480.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.259.394.000,00							12 Laporan	3.259.394.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.992.800,00							12 Laporan	49.992.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						49.992.800,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			49.992.800,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.992.800,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	49.992.800,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.229.480.400,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			2.229.480.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.229.480.400,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	2.229.480.400,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.259.394.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			3.259.394.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.259.394.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	3.259.394.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.258.989.300,00						-		6.454.017.300,00	
		Terpeliharanya kondisi sarana dan prasarana kerja perangkat daerah agar tetap laik pakai						7.258.989.300,00						-		6.454.017.300,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		4 Unit	4 Unit	4.590.860.000,00							3 Unit	4.590.860.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.863.157.300,00							2 Unit	1.863.157.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	804.972.000,00							6 Unit	0,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.863.157.300,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			1.863.157.300,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	46 Unit	1.863.157.300,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	1.863.157.300,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						804.972.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	0 Unit	804.972.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	0,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.590.860.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			4.590.860.000,00	

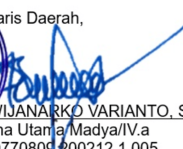
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		4 Unit	4 Unit	4.590.860.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	4.590.860.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						7.914.412.960,00						-		7.914.412.960,00	
		Tersedianya layanan kebutuhan operasional harian pimpinan secara optimal						7.914.412.960,00						-		7.914.412.960,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	6.017.199.000,00							2 Orang/Bulan	6.017.199.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.897.213.960,00							2 Orang/Bulan	1.897.213.960,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.897.213.960,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			1.897.213.960,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.897.213.960,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Orang/Bulan	1.897.213.960,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						6.017.199.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			6.017.199.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	6.017.199.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Orang/Bulan	6.017.199.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						623.712.000,00						-		623.712.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan logistik dan operasional rumah dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah						623.712.000,00						-		623.712.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.094.000,00							12 Paket	300.094.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	323.618.000,00							12 Paket	323.618.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						300.094.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			300.094.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	300.094.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	300.094.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						323.618.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			323.618.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	323.618.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	323.618.000,00	Bagian Umum
	J U M L A H							50.734.162.349,00								49.929.190.349,00	

Ranai, 3 Agustus 2026



Wakil Sekretaris Daerah,



WILJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama/Madya/IV.a

NIP. 19770809 200212 1 005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN KAB. NATUNA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						638.645.000,00								124.031.311,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						638.645.000,00								124.031.311,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						638.645.000,00								124.031.311,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						638.645.000,00								124.031.311,00	
		Meningkatnya Persentase agenda pimpinan daerah yang dipublikasikan secara terbuka melalui media resmi pemerintah						638.645.000,00								124.031.311,00	
			999.Persentase agenda pimpinan daerah yang dipublikasikan secara terbuka melalui media resmi pemerintah	100 Persentase		70 Persentase	80 Persentase	638.645.000,00							90 Persentase	124.031.311,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						638.645.000,00						-		124.031.311,00	
		Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan daerah						638.645.000,00						-		124.031.311,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	335.054.700,00							12 Laporan	55.326.857,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	108.313.300,00							12 Laporan	27.044.380,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.277.000,00							12 Laporan	41.660.074,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						335.054.700,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			55.326.857,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	335.054.700,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	55.326.857,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						108.313.300,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			27.044.380,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	108.313.300,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	27.044.380,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						195.277.000,00			-	-	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan			41.660.074,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.277.000,00	Kab. Natuna	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	41.660.074,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	J U M L A H							638.645.000,00								124.031.311,00	

Ranai, 3 Agustus 2026

Secretaris Daerah,



ROY WIJANARKO VARIANTO, SE

Pembina Utama Madya/IV.a

NIP. 19770809200212 1 005